

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2010
- Fariz, Donal. dkk., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014
- Hadjon, Philipus M. dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: CetakanKedua*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Immanuel Patiro, Yopie Mayora. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Keni Media, 2012
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, 2015
- Moeimam, Susi dan Steinhauer, Hein. *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: GramediaPustaka, 2005
- Nurjana, Igm. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2010
- Ompu Sunggu, Tubur. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam PenegakanHukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2012
- Parmono, Budi. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Disertasi*, Malang: Fakultas Hukum UB, 2011
- Philipus M. Hadjon, Kisi-kisi Hukum Administrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Jakarta: TransparansiInternational Indonesia, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2014

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press,

2014 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-*

*Suatu Tinjauan*

*Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2006

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*

*Korupsi,*

*Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

#### **Jurnal**

Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, dan Suhardin, *Makna "Sifat Melawan Hukum" Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)*, Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013

Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014

Suhariyono AR, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Perspektif*, Edisi Januari Volume XVII No. 1 Tahun 2012

Supandi (Hakim Agung), dalam diskusi mengenai pemberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, detiknews.com, senin 30 Mar 2015, 12:26 Wib

Yulius, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015

Wasis Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013

## Undang-Undang

Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2958;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.